



Metro (Hal. 4)

Senin, 10 Februari 2020

Dana Bagi Hasil Rp 9,5 Miliar Belum Terealisasi

METRO, Tondano- Sebagian Dana Bagi Hasil dengan pemerintah pusat untuk tahun 2019 lalu sekitar Rp 9,5 Miliar belum terealisasi.

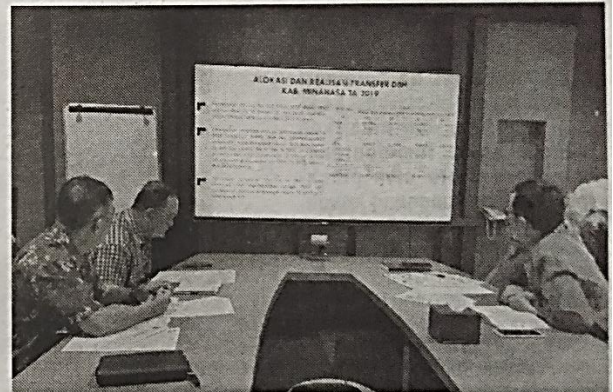
Oleh karena itu Bupati Royke O Roring (ROR) mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenuk) untuk mengkonsultasikan hal tersebut, Jumat (7/2) lalu. Hasilnya dikatakan Bupati bahwa jumlah itu akan direalisasikan tahun 2020 ini.

"Akan memperhitungkan dan merealisasikan dana yang belum terbayar itu di tahun ini. Sehingga ini demi menunjang pelaksanaan program pembangunan di Minahasa," tukas Bupati.

Alokasi DBH dari pemerintah pusat untuk Minahasa di tahun 2019 awalnya ditetapkan se-

besar Rp 32.460.000.000 dan kemudian direvisi menjadi Rp 31.960.000.000. Penetapan itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. Namun yang direalisasikan hingga triwulan III tahun 2019 baru sebesar Rp 22.390.000.000, sehingga ada sisa Rp 9.580.000.000 yang belum tersalur.

Kepala BPKAD Donald Wagey menjelaskan bahwa dana yang belum tersalur itu salah satunya adalah DBH Sumber Daya Alam (SDA) dari sektor perusahaan panas bumi yang direalisasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Me-



» Bupati saat mendatangi mendatangi Kemenkeu.

urutnya itu merupakan dana realisasi PNBP dan dibagihasil-perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan pada kan ke daerah penghasil, termasuk di Minahasa.⁽³⁾